

## BAB II

### STRATEGI JEPANG DALAM MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI

#### CPTPP 2017-2018

Bab ini membahas mengenai strategi Jepang dalam mempertahankan negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) paska keluarnya Amerika Serikat dari organisasi kerjasama perdagangan global tersebut. Dengan demikian maka juga dijabarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Oleh karena itu dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub pembahasan. Pertama, mengenai perkembangan negosiasi perjanjian yang ada dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Kedua, mengenai negosiasi yang terjadi dalam TPP paska keluarnya Amerika Serikat, dimana disepakati munculnya *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) serta strategi yang digunakan oleh Jepang dalam menjaga keberlangsungan negosiasi yang ada dalam *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP).

#### 2.1 Perkembangan Negosiasi Perjanjian CPTPP

##### a. *Trans-Pacific Partnership*

Awal mulanya, organisasi perdagangan bebas kawasan ini diinisiasi oleh tiga negara yaitu Singapura, Selandia Baru dan Chili. Tahun 2002 merupakan awal mula pembentukan di sela-sela KTT *Asia-Pacific Economic Cooperation*. Pembentukan "*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*"

organisasi ini bertujuan untuk membuka pasar bebas di kawasan Asia Pasifik (Mofa New Zealand, pp. 2-5). Dengan demikian negara-negara anggota dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Sejalan dengan perkembangan waktu, Brunei Darussalam bergabung pada tahun 2005. Bergabungnya Brunei Darussalam menjadikan organisasi ini mendapatkan nama baru yaitu “*The Trans Pacific Strategic Economic Parthnership Agreement*” (TPSEP atau P4). Pada 2009, Amerika Serikat bergabung dengan organisasi ini, bergabungnya Amerika Serikat didorong oleh adanya kebuntuan dalam *Doha Round* yang membahas mengenai liberalisasi pasar (Granville, 2017).

Bertambahnya Amerika Serikat sebagai anggota juga menjadi titik penting transformasi organisasi perdagangan bebas ini. Perubahan juga terjadi pada nama organisasi ini menjadi “*Trans Pacific Parthnership*” (TPP). Munculnya *Trans Pacific Partnership* (TPP) dibawah pimpinan Amerika Serikat juga mendorong negara-negara lain untuk bergabung. Sejak tahun 2009 hingga 2013, sejumlah negara bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pada tabel 2.1 menunjukan sejumlah negara yang tergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

<b>Tabel 2.1</b> <b>Anggota <i>Trans Pacific Partnership</i></b>		
<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Tahun Keanggotaan</b>
1.	Amerika Serikat	2008
2.	Australia	2008
3.	Brunei Darussalam	2005

4.	Chili	2002
5.	Jepang	2013
6.	Kanada	2012
7.	Malaysia	2010
8.	Meksiko	2012
9.	Peru	2008
10.	Selandia Baru	2002
11.	Singapura	2002
12.	Vietnam	2008
Sumber : (Cerdeiro, 2016, p. 04)		

Terdapat 19 negosiasi TPP yang terjadi dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2015. Dalam TPP menghasilkan beberapa kesepakatan. Pada tabel 2.2 menjabarkan mengenai lokasi dan tempat terjadinya pertemuan dan negosiasi (Congressional Research Service, 2013, p. 02).

<b>Tabel 2.2</b>		
<b>Negosiasi-negosiasi TPP 2010-2015</b>		
<b>No.</b>	<b>Tempat &amp; Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Putaran 1, Melbourne, Australia, 18-19 Maret 2010	Negosiasi
2.	Putaran 2, San Fransisco, Amerika Serikat, 14-18 Juni 2010	Negosiasi
3.	Putaran 3, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5-8 Oktober 2010	Negosiasi
4.	Putaran 4, Auckland, Selandia Baru, 6-10 Desember 2010	Negosiasi

5.	Putaran 5, Santiago, Chili, 14-18 Februari 2011	Negosiasi
6.	Putaran 6, Singapura, 24 Maret-1 pril 2011	Negosiasi
7.	Putaran 7, Ho Chi Minh, Vietnam, 15-24 Juni 2011	Negosiasi
8.	Putaran 8, Chichago, Amerika Serikat, 6-16 September 2011	Negosiasi
9.	Putaran 9, Lima, Peru, 22-29 Oktober 2011	Negosiasi
10.	Putaran 10, Kuala Lumpur, Malaysia, 5-9 Desember 2011	Negosiasi
11.	Putaran 11, Victoria, Australia, 2-9 Maret 2012	Negosiasi
12.	Putaran 12, Texas, Amerika Serikat, 8-18 mei 2012	Negosiasi
13.	Putaran 13, San Diego, Amerika Serikat, 2-10 Juli 2012	Negosiasi
14.	Putaran 14, Lessburg, Amerika Serikat, 6-15 September 2012	Negosiasi
15.	Putaran 15, Auckland, Selandia Baru, 3-12 Desember 2012	Negosiasi
16.	Putaran 16, Singapura, 4-13 Maret 2013	Negosiasi
17.	Putaran 17, Lima, Peru, 15-24 Mei 2013	Negosiasi
18.	Putaran 18, Kinabalu, Malaysia, 14-24 Juli 2013	Negosiasi
19.	Putaran 19, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 23-30 Agustus 2013	Negosiasi
Sumber : (SICE, 2019)		

Selain 19 putaran negosiasi, juga terjadi beberapa negosiasi dan pertemuan yang dilakukan negara-negara anggota. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan TPP. Tercapainya TPP meliputi peraturan yang berisi 30 bab yang membahas mengenai isu-isu yang terkait dengan “*trade-related issues, beginning with trade in goods and continuing through customs and trade facilitation; sanitary and phytosanitary measures; technical barriers to trade; trade remedies; investment; services; electronic commerce; government procurement; intellectual property; labour; environment; ‘horizontal’ chapters meant to ensure that TPP fulfils its potential for development, competitiveness, and inclusiveness; dispute settlement, exceptions, and institutional provisions*” (Ustr.gov, 2015).

Disamping itu juga disepakati lima fitur atau garis besar dalam TPP. Kelima hal tersebut adalah; Pertama, *Comprehensive market access*, yaitu TPP menghilangkan hambatan baik tarif maupun non-tarif pada semua bidang ekonomi termasuk barang, jasa dan investasi. Dengan demikian akan meningkatkan kesempatan terhadap pemain-pemain dalam pasar; Kedua, *Regional approach to commitments*, TPP memfasilitasi pengembangan produksi dan rantai suplai dalam rangka meningkatkan produktifitas ekonomi; Ketiga, *Addressing new trades challenges*, TPP mempromosikan inovasi, produktifitas dan kompetisi dalam menghadapi isu-isu kekinian termasuk pengembangan ekonomi digital; Keempat, *Inclusive trade*, TPP berusaha memberikan kesempatan ekonomi kepada semua pemain dalam pasar, termasuk Usaha Kecil Menengah dalam berkompetisi dan memaksimalkan keuntungan ekonomi. Serta memastikan semua pihak terpenuhi hal-hal yang diinginkan; Kelima, *Platform for regional*

*integration*, TPP ditujukan untuk menjadi landasan integrasi ekonomi kawasan serta tambahan ekonomi di seluruh Asia-Pasifik (Ustr.gov, 2015).

Meskipun telah menjadi dokumen yang telah diselesaikan dalam negosiasi, namun TPP-12 tidak berhasil dilanjutkan. Hal ini disebabkan keputusan Amerika Serikat yang mundur dari TPP di tahun 2017, paska Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Donald Trump menilai perjanjian TPP memberikan dampak yang negatif atau merugikan bagi ekonomi Amerika Serikat. Sehingga menganggap keluarnya Amerika Serikat dari organisasi merupakan pilihan yang tepat dengan slogan kampanye Donald Trump yaitu “*America First*”. Keluarnya pemimpin serta mitra dagang terbesar TPP-12 dari organisasi tentu memaksa terjadinya re-orientasi perjanjian perdagangan bebas (CNN Indonesia, 2017).

## **2.2 TPP Paska Keluarnya Amerika Serikat : CPTPP**

Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari organisasi perdagangan bebas regional TPP pada tahun 2017 merupakan salah satu janji kampanye presiden Donald Trump yang ditepati. Keluarnya Amerika Serikat juga membuat organisasi perjanjian perdagangan bebas kawasan ini mengubah nama. Pada tahun 2018, organisasi yang awalnya bernama (TPP-12) berubah menjadi “*Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership*” (CPTPP) atau TPP-11. Hal yang membedakan TPP-11 dengan TPP-12 adalah selain non-partisipasi Amerika Serikat, juga terdapat beberapa perubahan yang dilakukan dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP didorong oleh beberapa pertimbangan. Diantara hal yang paling dipercayai oleh Donald Trump adalah bergabungnya Amerika Serikat dalam TPP mengakibatkan berkurangnya pekerjaan yang tercipta di Amerika Serikat. Berkurangnya pekerjaan yang tersedia disebabkan karena pekerjaan tersebut berpindah sebagai konsekuensi adanya perjanjian perdagangan bebas seperti TPP. Dengan demikian Donald Trump kembali menegaskan komitmen untuk mendahulukan janji kampanye dengan slogan *"America First"*. Dalam pidatonya pada tahun 2017, Donald Trump menilai bahwa perdagangan harus dilakukan dengan adil, merujuk pada perjanjian yang tidak adil seperti TPP.

*"Kita akan melakukan perdagangan tetapi kita akan melakukannya dengan masing-masing negara. Dan jika ada yang bertingkah, kita akan mengirim surat peringatan penghentian, 30 hari dan mereka harus meluruskan itu, atau kita pergi. Tak satu pun dari perjanjian ini mencegah kita keluar jika menjadi merugikan. Jadi kita akan memiliki banyak perjanjian perdagangan. Tapi TPP itu bukan cara yang benar"* (Voa Indonesia, 2017).

Donald Trump juga menambahkan pada pidatonya bahwa TPP merupakan kesepakatan perjanjian perdangan bebas yang buruk dan merugikan bagi Amerika Serikat.

*"Kemitraan Trans Pasifik merupakan serangan terhadap bisnis Amerika. Ini tidak menghentikan manipulasi mata uang China. Ini adalah kesepakatan yang buruk"*. (Voa Indonesia, 2017)

Tentu saja kepergian Amerika Serikat dari TPP menjadi paradoks bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini mengingat TPP bukan merupakan sebuah kebijakan yang murni untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Melainkan juga menjadi instrumen politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, termasuk dalam munculnya pengaruh besar Tiongkok di kawasan. Sebelumnya pada masa presiden Barack Obama, Amerika

Serikat memiliki beberapa keuntungan dalam bergabung dengan TPP. Adapun keuntungan tersebut diantaranya meningkatkan ekonomi Amerika Serikat secara menyeluruh seperti upah kepada tenaga terdidik dan tidak terdidik, yang mana pendapatan yang didapatkan dari adanya upah tenaga kerja akan lebih besar dari *capital income* (Cimino-Isaacs, 2016, pp. 63-4).

Keuntungan-keuntungan bagi Amerika Serikat yang telah disebutkan diatas tentu saja telah diabaikan oleh Donald Trump. Sehingga aspek-aspek non-ekonomi Amerika Serikat tidak dijadikan sebagai prioritas utama Amerika Serikat sebagai landasan politik luar negeri. Dengan demikian maka pembahasan ini krusial bagi titik balik TPP.

*“...It is the policy of my Administration to represent the American people and their financial well-being in all negotiations, particularly the American worker, and to create fair and economically beneficial trade deals that serve their interests. Additionally, in order to ensure these outcomes, it is the intention of my Administration to deal directly with individual countries on a one-on-one (or bilateral) basis in negotiating future trade deals. Trade with other nations is, and always will be, of paramount importance to my Administration and to me, as President of the United States. (White House, 2017)*

#### **a. Respon Domestik Jepang terhadap keluarnya AS dari TPP**

Paska keluarnya Amerika Serikat, Jepang secara cepat melakukan upaya untuk ratifikasi perjanjian baru CPTPP atau TPP-11 (Nikkei, 2018). Bahkan menurut Toshimitsu Motegi, menteri Ekonomi dan negosiasi TPP mengatakan bahwa Jepang ingin menjadi diantara negara pertama yang melakukan ratifikasi TPP-11, *“Japan wants to be among the first to get it passed* (Nikkei, 2018).

Dengan demikian diketahui bahwa percepatan ratifikasi TPP-11 sangat diperlukan oleh Jepang. Mundurnya Amerika Serikat TPP juga mendapatkan respon dari pihak-pihak (aktor-aktor) yang berada di domestik Jepang. *Pertama*, Pihak koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Demokratik Liberal (LDP) dan



Partai *Komeito* memberikan respon yang cukup terkejut. Disamping itu Presiden sekaligus ketua koalisi LDP-Komeito juga paska keluarnya Amerika Serikat, Jepang tetap berharap bahwa Amerika Serikat dapat kembali bergabung dengan perjanjian perdagangan bebas ini. Sementara itu keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat Jepang lebih mengambil peran yang besar dalam perjanjian kawasan tersebut. *Kedua*, sikap tersebut juga mendapatkan respon dari partai oposisi terbesar “*Partai Demokratik Konstitusional Jepang*” (CDP). CDP mempertanyakan tindakan pemerintah Jepang dibawah LDP yang tergesa-gesa dalam mendorong ratifikasi TPP baru dalam parlemen. Kritik keras ini ditujukan dalam rangka pembelaan CDP terhadap sektor pertanian Jepang yang mendapatkan kerugian, dengan timbal balik keuntungan dalam ekspor industri (Agrinews, 2018).

*Ketiga*, disamping dari sektor politik, terdapat ketua kelompok asosiasi pengusaha Jepang (*Keindanren*) Mr. Sadayuki Sakakibara juga memberikan komentar terkait keluarnya Amerika Serikat dari TPP;

*With the announcement of the U.S. withdrawal from the TPP by President Donald Trump, now is not the time to discuss the issue with the U.S. government. The withdrawal of the U.S. has reduced the economic and geopolitical benefits of the TPP.... While we hope that the United States will rejoin the TPP in the future, it is important first that TPP-11 be realized at an early stage.* (Keindanren, 2017)

Dalam pernyataan tersebut, ketua asosiasi pebisnis Jepang mengharapkan bergabungnya Amerika Serikat kembali dalam TPP. Sikap kelompok ini terhadap Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa TPP dinilai membawa perusahaan-perusahaan Jepang pada level global, dengan demikian dapat membawa keuntungan yang besar.

Dengan pembahasan diatas maka dapat ditarik garis besar bahwa terdapat kekecewaan yang terjadi dalam domestik Jepang mengenai keputusan Amerika Serikat meninggalkan TPP. Hal ini dilandasi fakta bahwa Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Jepang dalam skema TPP. Keluarnya Amerika Serikat tentu akan mengurangi potensi keuntungan yang didapatkan oleh Jepang dari adanya skema perdagangan bebas. Ini. Dengan posisi Amerika Serikat yang sangat penting sebagai mitra, maka baik partai berkuasa partai Liberal Demokratik (LDP) maupun kelompok kepentingan seperti Keindanren mengharapkan agar Amerika Serikat untuk bergabung kembali dalam TPP pada masa waktu yang akan datang.

***b. Peran Aktif Jepang Dalam Negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP)***

Keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* meninggalkan kekosongan kepemimpinan dalam perjanjian perdagangan bebas ini. Selain kekosongan dalam kepemimpinan dari negara *superpower* dunia, juga merupakan sebuah titik balik dimana aktor dagang paling utama dalam TPP justru keluar. Sehingga hal ini dapat melemahkan daya tarik dari aliansi ekonomi ini. Jepang memandang bahwa kekosongan kepemimpinan sebagai kesempatan. Dimana pada akhirnya Jepang memutuskan untuk mengambil alih keaktifan dalam negosiasi yang ditinggal oleh Amerika Serikat dalam TPP. Langkah Jepang yang lebih aktif dilakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dari Partai Liberal Demokrat (LDP). Perdana Menteri Shinzo Abe berpendapat bahwa;

*“We have finally come to agreement for free and fair trade, we hope to utilize that agreement framework, unfortunately U.S has declared withdrawal from the TPP since we*

*have come far, Japan must take on leadership role and bring and bring talk forward”* (Cnbc, 2017).

Dalam pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe tersebut dapat ditarik bahwa Jepang dibawah Shinzo Abe berniat mengambil sikap yang lebih aktif dalam negosiasi perjanjian perdangan bebas TPP. Hal tersebut karena negosiasi perjanjian perdagangan bebas tersebut telah dilakukan dalam waktu yang lama. Sehingga upaya kepemimpinan Jepang dalam *Comprehensive and Progressive Partnership for Trans-Pacific Partnership* juga tidak dapat dilepas dari upaya yang telah dilakukan Jepang dalam upayanya bergabung dalam TPP.

Menjadi lebih aktif dalam TPP tidak dapat dipisahkan dari sejarah Jepang dalam bergabung dengan TPP. Upaya bergabungnya Jepang dalam TPP dimulai sejak masa Perdana Menteri Naoto Kan dari partai Demokrat di tahun 2010. Negosiasi juga dilanjutkan pada masa Perdana Menteri Yoshihiko Noda dari partai yang sama. Pada tahun 2013, Jepang mengalami pergantian partai berkuasa, dimana Partai Liberal Demokrat dibawah Shinzo Abe memenangkan pemilihan umum dan menjadi pemerintahan. Meskipun terjadi pergantian kekuasaan, tidak membuat Jepang mundur dari negosiasi TPP, justru Perdana Menteri Shinzo Abe melanjutkan upaya untuk bergabung dalam TPP. Setelah negosiasi yang dilakukan sepanjang tahun 2013, pada akhirnya Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan niatan Jepang untuk bergabung dengan TPP. Pada pidatonya Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pada tiga hal yaitu; *Pertama*, TPP penting untuk merevitalisasi ekonomi Jepang; *Kedua*, pemerintah menjamin dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan dari sektor pertanian dalam menghadapi liberalisasi pasar; *Ketiga*, bergabungnya Jepang dalam TPP penting untuk memperkuat persekutuan dengan Amerika Serikat dan sekutu lain untuk

menciptakan nilai bersama guna menghasilkan peraturan baru dalam tatanan ekonomi (Davis, 2018, p. 06).

Keputusan Jepang untuk ikut dalam TPP didukung oleh beberapa kelompok kepentingan di Jepang. Diantaranya adalah kelompok bisnis dan birokrat, Terdapat dua jenis pebisnis di Jepang yaitu *gyokai* (*sectoral world*) merupakan kelompok pebisnis yang bergerak di bidang industri dan sektor pertanian dan *zaikai* (*business world*) merupakan organisasi induk dalam kalangan pebisnis komersil yang mana terdiri dari empat perusahaan besar. Disamping itu juga terdapat kelompok pebisnis swasta yang disebut dengan *Keiretsuka*, dimana merupakan salah satu kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam menekan munculnya sebuah pengambilan keputusan.

Salah satu kelompok *zeikai* yang memiliki pengaruh besar adalah *Keidanren*, dimana merupakan salah satu pendonor terbesar bagi Partai Liberal Demokratik (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Sehingga mengakomodasi suara kelompok ini merupakan bagian penting dalam membuat keputusan, baik dalam level domestik maupun internasional. Industri manufaktur Jepang Sementara itu Organisasi industri seperti “*Keidanren*” dan “*Asosiasi Manufaktur Automobil Jepang*” mendesak pemerintah untuk segera menyimpulkan negosiasi. Ketua Industri Teknologi elektronik dan informasi Jepang, Mr. Ryoji Chubachi menekankan bahwa untuk majunya industri yang dipimpinnya dalam menghadapi kompetisi internasional, maka perlu peranan pemerintah untuk segera memiliki perjanjian perdagangan bebas yang menjamin pengurangan tarif serta menjamin hak kekayaan intelektual. Disamping kelompok pebisnis, dalam lingkaran kekuasaan di Jepang juga terdapat kelompok

yang cukup berpengaruh, bahkan kelompok ini terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan (*decision making process*) terutama dalam kebijakan ekonomi. Kelompok ini merupakan birokrat yang terdiri dari 14 posisi menteri yang berada dibawah komando pemerintahan Perdana Menteri Jepang. Diantara posisi tersebut adalah menteri perekonomian Jepang.

Dalam menyikapi kepemimpinan Jepang dan sikap Jepang yang mempertahankan negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), ketua *Keidanren* memuji langkah yang diambil pemerintah Jepang dalam mengambil alih kepemimpinan dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP-11). Langkah Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menempatkan Jepang sebagai pemimpin salah satu poros ekonomi global juga di dukung oleh pemain industri domestik. Pada 2018, dari 121 perusahaan yang diambil sebagai contoh, 70% diantaranya berharap bahwa TPP-11 akan membawa dampak positif bagi perekonomian Jepang. Sementara itu 80% diantaranya akan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas tersebut sebagai peluang bisnis. Disamping itu dukungan juga tentu diberikan oleh kelompok birokrat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, mengingat pucuk pemerintahan Jepang dibawah Shinzo Abe berniat melanjutkan negosiasi.

Paska keluarnya Amerika Serikat, telah dilakukan beberapa negosiasi dalam CPTPP, telah diadakan beberapa pertemuan yang membahas mengenai kelanjutan dan negosiasi perdagangan. Sejak keluarnya Amerika Serikat pada Januari 2017, terdapat beberapa pertemuan yang telah dilakukan sampai akhirnya disepakati perjanjian dagang CPTPP pada akhir 2018. Pada tabel 2.3 dapat dilihat

kronologi waktu negosiasi yang dilakukan setelah keluarnya Amerika Serikat hingga tercapainya kesepakatan baru CPTPP.

<b>Tabel 2.3</b>		
<b>Negosiasi TPP Paska Keluarnya Amerika Serikat</b>		
<b>No.</b>	<b>Tempat dan Tanggal Negosiasi</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Januari 2017	Amerika Serikat keluar dari TPP
2.	02-03 Mei 2017, Ontario, Kanada	Pertemuan menteri-menteri anggota TPP-11
3.	21 Mei 2017, Hanoi, Vietnam	Pertemuan menteri-menteri ditengah KTT APEC, membahas langkah TPP selanjutnya paska keluarnya Amerika Serikat
4.	12-14 Juli 2017, Hakone, Jepang	Pejabat-pejabat senior anggota TPP bertemu untuk meluncurkan komitmen bersama untuk menciptakan pasar yang adil, bebas, progresif
5.	28-30 Agustus 2017, Sydney, Australia	Pertemuan kedua pejabat-pejabat senior untuk membahas mengenai potensi penyusunan perjanjian dagang baru
6.	19-22 September, Tokyo, Jepang	Pertemuan ketiga pejabat-pejabat senior untuk membahas kelanjutan potensi perjanjian baru
7.	30 Oktober-1 November 2017, Maihama, Jepang	Pertemuan keempat pejabat-pejabat senior

		mengenai kelanjutan perjanjian dagang baru
8.	November 2017, Da Nang, Vietnam	Pertemuan kelima pejabat-pejabat senior, menyepakati dasar perjanjian baru TPP yaitu CPTPP
9.	22-23 Januari 2018, Tokyo, Jepang	11 negara anggota menyepakati isi perjanjian final CPTPP
10.	18 Maret 2018, Santiago, Chili	11 negara anggota menandatangani perjanjian CPTPP. Pemberlakuan CPTPP akan mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif dan menghilangkan hambatan non-tarif dalam transaksi perdagangan
11.	30 Desember 2018	Penerapan CPTPP oleh enam negara; Australia, Kanada, Meksiko, Jepang, Selandia Baru, Singapura
12.	Januari 2019	Penerapan CPTPP di Vietnam
Sumber : (Timeline of the CPTPP, 2018)		

### c. Strategi Jepang Dalam Mempertahankan Negosiasi CPTPP

Paska keluarnya Amerika Serikat, Jepang mengeluarkan beberapa strategi dalam mempertahankan negosiasi yang ada dalam CPTPP. Adapun strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut;

*Pertama*, upaya Jepang untuk mempertahankan jalannya negosiasi dalam CPTPP serta kelangsungan eksistensi organisasi kerjasama perdagangan bebas regional tersebut adalah dengan berupaya menarik kembali Amerika Serikat ke dalam organisasi. Hal ini dapat dipahami sebagai langkah strategis guna memperkuat organisasi yang telah ada. Sehingga keluarnya Amerika Serikat dari TPP, tidak menyurutkan upaya Jepang untuk kembali menarik Amerika Serikat kembali menjadi anggota. TPP merupakan salah satu perjanjian internasional yang penting bagi pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini disebabkan karena ekonomi “*Abenomics*” membutuhkan perjanjian dagang ini untuk mengatasi deflasi dan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Dengan adanya TPP maka memungkinkan untuk terjadinya reformasi struktural dalam ekonomi Jepang atau dengan kata lain merevitalisasi sektor swasta (Takashi, 2018). Dengan posisi penting TPP bagi Jepang maka Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha secara maksimal untuk mempertahankan keberlangsungan perjanjian perdagangan bebas ini. Usaha maksimal yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe adalah dengan menemui berbagai pemimpin anggota TPP. Terutama menemui presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2016 di Trump Tower, Amerika Serikat. Pertemuan ini diadakan sebelum Amerika Serikat resmi keluar dari perjanjian dagang TPP. Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Shinzo Abe menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk membujuk Donald Trump agar membiarkan Amerika Serikat tetap bergabung dalam TPP. Selain menemui presiden terpilih Donald Trump, Perdana Menteri Shinzo Abe juga berupaya untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin dari negara anggota lain agar berkomitmen pada TPP, diantara pemimpin dunia tersebut



adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden menjabat Amerika Serikat pada saat itu Barack Obama dan juga dengan pemimpin Australia serta Vietnam pada tahun 2017 (Takashi, 2018). Dengan upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa TPP merupakan perjanjian vital bagi Jepang.

Deputi Perdana Menteri Jepang juga percaya bahwa Amerika Serikat akan sadar bahwa hubungan dagang bilateral dengan Jepang hanya membawa keuntungan yang sedikit dibanding hubungan dagang dengan mekanisme TPP. Beberapa pertemuan diadakan dalam rangka mengajak Amerika Serikat untuk tidak meninggalkan TPP pada tahun 2017. Dimana negosiator dari 7 partai berkumpul di Tokyo untuk membuat draft dokumen perjanjian sebelum pertemuan APEC. Jepang masih percaya bahwa TPP-11 (CPTPP) masih terbuka lebar bagi Amerika Serikat untuk bergabung kembali kemudian. Pemerintah Jepang menolak upaya dari negara anggota TPP-11 lain untuk merubah peraturan perjanjian, dimana percaya bahwa hal tersebut akan membuat Amerika Serikat menolak kembali bergabung dengan TPP-11. Seorang pejabat Sekretariat Kabinet Jepang menggaris bawahi bahwa satu-satunya opsi untuk meyakinkan Amerika Serikat adalah untuk tidak merenegosiasi. Hal tersebut merupakan respon dari saran Selandia Baru yang akan menerapkan pengaturan ketat pada bidang *real estate*.

*Kedua*, Jepang memimpin negara-negara anggota untuk menanggukhan ketentuan dalam TPP yang sebelumnya menjadi faktor keberatan Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPP. Para pihak sepakat untuk menanggukhan 20

ketentuan, yang terutama dicari oleh Amerika Serikat dan disetujui oleh negara-negara lain dengan imbalan akses ke pasar A.S. Hal ini terutama berlaku di bidang hak kekayaan intelektual (IPR) di mana CPTPP menanggukkan ketentuan mengenai paten untuk penemuan yang berasal dari pabrik; paten untuk penggunaan baru, proses atau metode produk yang sudah ada (disebut *evergreening*); penyesuaian periode paten untuk keterlambatan pemasaran dan persetujuan paten; perlindungan data uji yang tidak diungkapkan untuk obat-obatan kimia dan biologis; periode hak cipta + 70 tahun penulis / pencipta; kewajiban hukum dan peraturan yang aman untuk penyedia layanan internet; pengelakan dan manajemen hak digital; dan perlindungan program enkripsi dan satelit dan sinyal kabel (Charlotte Greenfield, 2018). Disamping itu Motegi, juru runding CPTPP menyambut baik kepentingan dari banyak negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam CPTPP. Dalam pernyataannya, Motegi menyampaikan poin-poin penting, diantaranya;

- Optimis bahwa AS dan China dapat membuat kemajuan dalam pembicaraan perdagangan mereka;
- Sangat penting bagi Jepang dan AS untuk membuat kerangka kerja bagi pembicaraan perdagangan mereka sendiri, yang harus bebas dan adil;
- Menyadari keinginan AS untuk mengurangi defisit dagangannya dengan Jepang; investasi di A.S. oleh perusahaan-perusahaan Jepang menciptakan sejumlah besar pekerjaan Amerika Serikat;
- Motegi dalam komentar yang relevan dengan China, dia mengatakan Jepang akan terus bekerja sama dengan AS dan Eropa dalam menangani masalah kekayaan intelektual (Miller, 2018).